



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: <b>1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI;</b> <b>2. Inspektur Jenderal Kemendikbud RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Sabtu, 19 September 2015.</b>
Pukul	: <b>09.45 – 13.10 WIB.</b>
Tempat	: Grand Kemang Hotel, Jakarta
Pimpinan Rapat	: DR.Abdul Kharis Almasyhari/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPRRI.
Acara	: 1. Pembahasan RKA K/L 2016; 2. Lain-lain.
Hadir	: 33 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 09.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/DR. Abdul Kharis Almasyhari, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Sekjen dan Irjen Kemendikbud RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.**

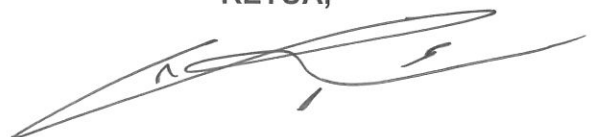
- A. Terhadap pagu anggaran (sementara) **Sekjen Kemendikbud RI RAPBN TA 2016** sebesar Rp2.889.931.000.000,- (*Dua triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta*), Komisi X DPR RI belum menyetujui yang dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Harus ada pemisahan yang tegas CPNS yang telah dilatih dalam prajabatan di Kemendikbud RI dan Kemenristekdikti RI.
  2. Beberapa program masih perlu ditingkatkan anggarannya seperti misalnya:
    - a. Program bantuan lembaga/organisasi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
    - b. Program beasiswa unggulan dengan perluasan sasaran penerima; dan
    - c. Program pengembangan layanan jardiknas untuk satuan pendidikan dengan memperhatikan daerah-daerah tertentu seperti misalnya daerah 3T.
  3. Mengkaji lebih lanjut terhadap program yang bersinggungan (beririsan) dengan satker lain seperti:
    - a. Pengembangan dan apresiasi perfilman Indonesia sebesar Rp57.658.718.000,- (*Lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*).
    - b. Layanan pendidikan melalui rumah belajar sebesar Rp37.445.235.000,- (*Tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
  4. Mekanisme program pelaksanaan layanan publikasi dan informasi pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp48.245.041.000,- (*Empat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta empat puluh satu ribu rupiah*) perlu dikaji ulang, misalnya dalam pelaksanaannya melibatkan para pemangku kepentingan.
- B. Terhadap pagu anggaran (sementara) **Itjen Kemendikbud RI RAPBN TA 2016** sebesar Rp195.941.727.000,- (*Seratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), Komisi X DPR RI belum menyetujui dikarenakan beberapa hal yang harus diusulkan (disusun) ulang terhadap kegiatan strategis seperti:
1. Penjabaran pemahaman filosofi pencegahan bebas dari korupsi untuk satker dan satuan pendidikan.
  2. Perlunya indeks keberhasilan pengawasan untuk audit operasional keuangan, audit program strategis, dan reviu akuntabilitas keuangan.
  3. Menyusun ulang rasionalitas volume dan rasionalitas anggaran di masing-masing inspektorat.
  4. Peningkatan fungsi pengawasan untuk anggaran fungsi pendidikan di luar Kemendikbud RI seperti misalnya DAK Pendidikan, BOS, Tunjangan Guru, dan BOP PAUD.

### III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 13.10 WIB.

KETUA,



DR.ABDUL KHARIS ALMASYHARI